



PENGARUH KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN SEBAGAI HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN SDGs DI INDONESIA

**Febriyanti Revalentina Naibaho¹, Rut Hutauruk², Pesta Sugianti Simanungkalit³,
Khairuddin Ependi Tambunan⁴**

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan^{1,2,3,4}

Email : febriyantirevalentina15@gmail.com

Diterima: 30/5/2026; Direvisi: 10/6/2026; Diterbitkan: 16/6/2026

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pengaruh kemiskinan dan ketimpangan pendapatan sebagai hambatan dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Permasalahan ini menjadi penting karena masih adanya ketimpangan akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan kesempatan ekonomi yang menghambat pembangunan inklusif menuju Indonesia Emas 2045. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui analisis berbagai sumber ilmiah, seperti jurnal, buku, dan data Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan bersifat multidimensional dan dipengaruhi oleh faktor seperti kualitas sumber daya manusia, pengangguran, dan akses terhadap layanan dasar. Di sisi lain, ketimpangan pendapatan memperburuk kondisi kemiskinan melalui distribusi ekonomi yang tidak merata dan rendahnya mobilitas sosial. Kedua faktor tersebut terbukti menjadi hambatan utama dalam pencapaian SDGs, terutama pada tujuan pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan, sehingga diperlukan kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan, Sustainable Development Goals (SDGs)*

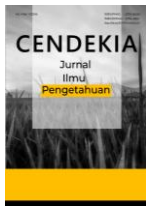
ABSTRACT

This study examines the impact of poverty and income inequality as barriers to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. This issue is critical due to persistent disparities in access to resources, education, and economic opportunities, which hinder inclusive development toward Indonesia Gold 2045. This research employs a qualitative method with a literature study approach by analyzing various scientific sources, including journals, books, and data from the Central Statistics Agency (BPS). The findings indicate that poverty is multidimensional and influenced by factors such as human capital quality, unemployment, and access to basic services. Meanwhile, income inequality exacerbates poverty through unequal income distribution and limited social mobility. Both factors are proven to be major obstacles in achieving the SDGs, particularly in poverty eradication and inequality reduction, thus requiring integrated and sustainable policy interventions.

Keywords: *Poverty, Income Inequality, Sustainable Development Goals (SDGs)*

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan hingga saat ini masih menjadi isu krusial yang mengganjal laju pembangunan nasional serta mereduksi pencapaian kemakmuran masyarakat yang berkeadilan di Indonesia. Fenomena ini memicu munculnya disparitas yang mencolok dalam hal pemenuhan hak-hak dasar, akses jaminan pendidikan yang bermutu, serta perluasan kesempatan kerja produktif bagi kelompok masyarakat marjinal. Eksistensi hambatan struktural tersebut secara nyata bertentangan dengan komitmen global yang tertuang dalam



dokumen *sustainable development goals*, khususnya pada mandat penghapusan kemiskinan ekstrem dan pengurangan segala bentuk kesenjangan sosial. Dalam kerangka pembangunan nasional, cita-cita besar untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju dengan tingkat kesejahteraan yang merata menuntut adanya orientasi kebijakan fiskal yang berfokus pada perbaikan kualitas hidup manusia secara holistik. Pertumbuhan ekonomi makro yang tinggi tidak akan memiliki arti substantif jika tidak dibarengi dengan pemerataan ekonomi di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, percepatan penanggulangan masalah kemiskinan dan penurunan angka ketimpangan pendapatan bertindak sebagai kunci utama untuk membuka ruang bagi terciptanya tatanan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global (C et al., 2026; Irmawanti & Winario, 2026; Putri & Choiri, 2024; Ruhana et al., 2024).

Secara konseptual, fenomena kemiskinan dicirikan oleh ketidakmampuan absolut maupun relatif dari individu untuk memenuhi kebutuhan standar minimum kehidupan, seperti kecukupan nutrisi pangan, papan yang layak, dan akses kesehatan yang memadai. Manifestasi dari kelemahan daya beli ini tidak hanya berimplikasi pada penurunan derajat produktivitas biologis semata, melainkan juga berpotensi menciptakan disrupsi yang merusak stabilitas keamanan sosial dan lanskap politik suatu negara. Kelompok masyarakat kelas bawah yang terus terisolasi dari pusaran roda ekonomi cenderung akan kehilangan kepercayaan terhadap institusi hukum dan keadilan pemerintah, sehingga memicu eskalasi konflik horizontal di tengah masyarakat. Di sisi lain, tingginya angka ketimpangan pendapatan menyebabkan akumulasi kekayaan nasional hanya berputar dan dinikmati oleh segelintir kelompok elit penguasa modal, sementara masyarakat luas hanya mendapatkan dampak sisa yang semu. Pola pertumbuhan yang eksklusif ini akan memperlebar jurang pemisah antarkelas sosial, melemahkan daya serap pasar domestik, serta berkontribusi langsung terhadap penurunan performa pertumbuhan ekonomi jangka panjang akibat minimnya investasi modal manusia yang berkualitas secara merata (Fuady et al., 2022; Indriyani et al., 2026; Regina, 2022; Sabur et al., 2021).

Kondisi ideal yang dicita-citakan oleh para pengambil kebijakan adalah terbentuknya suatu ekosistem perekonomian yang kokoh, di mana laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat berjalan selaras dengan penurunan indeks ginit. Setiap warga negara diidealkan memiliki peluang yang setara untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mandiri melalui pemanfaatan fasilitas infrastruktur publik digital, bantuan modal usaha mikro, serta penyerapan tenaga kerja yang adil tanpa diskriminasi. Upaya pengentasan kemiskinan seharusnya diintegrasikan secara presisi ke dalam program strategis lintas sektoral yang mampu menyentuh wilayah pelosok secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, jaminan kemakmuran yang merata dapat berfungsi sebagai fondasi utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional menghadapi ketidakpastian pasar global. Pengondisian ideal ini menempatkan setiap elemen masyarakat bukan sekadar sebagai objek penderita dari program bantuan sosial pemerintah, melainkan memposisikan mereka sebagai subjek pembangunan aktif yang mandiri, produktif, kreatif, serta memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni untuk berkontribusi langsung dalam memajukan peradaban bangsa (Annisa, 2022; Fatikasari et al., 2026; Lefaan, 2025).

Namun, realitas objektif yang senyatanya terjadi di lapangan menunjukkan adanya jurang pemisah yang cukup lebar antara ekspektasi teoretis tersebut dengan praktik pengentasan kemiskinan di Indonesia. Program perlindungan sosial yang digulirkan oleh pemerintah selama ini sering kali terbentur pada masalah klasik berupa ketidakakuratan data terpadu kesejahteraan sosial yang memicu salah sasaran distribusi bantuan. Di samping itu, efektivitas perluasan akses pendidikan yang diharapkan mampu memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi ternyata masih terkendala oleh buruknya mutu sarana prasarana sekolah di wilayah pinggiran.



Pertumbuhan ekonomi nasional senyatanya masih didominasi oleh sektor padat modal yang minim menyerap tenaga kerja lokal, sehingga angka pengangguran terbuka di kalangan usia produktif tetap tinggi. Kesenjangan yang kontras antara teks regulasi dengan implementasi operasional kebijakan ini menyebabkan target pengurangan ketimpangan berjalan sangat lambat, sementara ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi informasi justru semakin melebar dan mengakar secara struktural dalam kehidupan masyarakat di berbagai daerah (Irawaty & Wijayanti, 2026; Prasetyo & Setyadharma, 2022; Statistik et al., 2022; Windarto et al., 2025).

Berangkat dari tumpukan problematika manajerial tersebut, penelitian ini hadir dengan menawarkan nilai kebaruan berupa analisis integratif yang mengkaji korelasi dinamis antara kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Celah penelitian yang berhasil ditemukan menunjukkan bahwa literatur terdahulu masih cenderung membahas variabel-variabel tersebut secara terpisah atau terisolasi pada satu domain tertentu saja, sehingga gagal menyajikan gambaran kausalitas yang utuh. Inovasi dari riset makro ini terletak pada formulasi model evaluasi kebijakan komprehensif yang memposisikan kemiskinan bukan sekadar sebagai dampak kegagalan pembangunan, melainkan sebagai determinan utama yang menghambat pemenuhan indikator tata kelola inklusif. Kajian ini dilaksanakan secara mandiri pada tingkat nasional dan tidak melibatkan institusi persekolahan tertentu, sehingga nama sekolah dan tahun ajaran tidak dicantumkan dalam pendahuluan ini. Hasil studi deskriptif ini diproyeksikan mampu memberikan kontribusi teoretis baru bagi khasanah ilmu ekonomi pembangunan, serta menjadi dasar perumusan kebijakan taktis yang aplikatif bagi pemerintah demi mempercepat perwujudan kesejahteraan yang berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi jenis penelitian deskriptif untuk mengkaji hambatan makroekonomi secara mendalam. Prosedur pelaksanaan riset mengadopsi metode studi literatur (*library research*) yang memfokuskan pengerjaan pada penelusuran, pengumpulan, dan penelaahan kritis terhadap data sekunder yang sah dari kepustakaan digital. Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci yang melakukan penjelajahan dokumen ilmiah tanpa melakukan manipulasi variabel empiris ataupun terjun langsung untuk observasi lapangan secara fisik. Ruang lingkup kompilasi data dibatasi secara terstruktur pada publikasi tepercaya yang dirilis dalam rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2026. Bahan dan sumber acuan teoretis yang digunakan meliputi artikel jurnal riset nasional, buku teks ekonomi pembangunan, serta dokumen laporan berkala yang diterbitkan resmi oleh badan pemerintah terkait. Melalui desain deskriptif ini, fenomena kemerosotan kesejahteraan dan disparitas kelas sosial dapat diuraikan secara koheren, sistematis, dan sesuai dengan realitas isu pembangunan yang berkembang di Indonesia.

Prosedur pengolahan data dalam kajian ini dijalankan melalui 3 tahapan analisis kualitatif yang sistematis, dimulai dari fase pencarian data, penyajian deskripsi tekstual, hingga penarikan kesimpulan. Alat bantu yang dipergunakan selama operasional riset meliputi komputer, lembar pencatatan berkas pustaka, serta kata kunci pencarian terencana seperti kemiskinan, distribusi pendapatan, dan target pembangunan berkelanjutan. Peneliti mengelompokkan ragam informasi berdasarkan tema spasial perdesaan-perkotaan serta parameter indeks kedalaman dan keparahan ekonomi masyarakat. Untuk menjamin derajat keabsahan dan akurasi interpretasi data teoretis yang dihimpun, peneliti menerapkan teknik pengujian berupa triangulasi sumber dengan cara mencocokkan serta membandingkan data angka dari laporan Badan Pusat Statistik terhadap argumen akademis dalam jurnal ilmiah.



Seluruh representasi data kuantitatif, seperti penulisan batas toleransi angka signifikansi 0,05 atau persentase garis kemiskinan sebesar 8,25 persen pada September 2025, disajikan menggunakan format angka nyata demi menjaga otentisitas pelaporan karya ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kemiskinan sebagai Fenomena Multidimensional

Kemiskinan pada hakikatnya merupakan sebuah fenomena multidimensional yang mencerminkan ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk mencapai standar hidup yang layak. Kondisi ini tidak boleh hanya ditinjau secara sempit dari sudut pandang rendahnya tingkat pendapatan atau minimnya kepemilikan aset materi semata (Noer, 2021; TOPER & Aslan, 2023). Kemiskinan juga mencakup keterbatasan akses yang parah terhadap fasilitas pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan dasar yang memadai, serta ketiadaan peluang ekonomi yang setara. Ketika masyarakat terjebak dalam lingkaran kekurangan ini, kapasitas mereka untuk mengembangkan potensi diri menjadi sangat terbatas, sehingga memicu munculnya kerentanan sosial yang meluas. Oleh karena itu, penanganan masalah kemiskinan menuntut adanya pemahaman yang komprehensif mengenai struktur sosial yang memengaruhi distribusi kesejahteraan di tengah masyarakat (Jati et al., 2023).

Dalam konteks pembangunan nasional, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tergolong besar dan menjadi tantangan struktural yang memerlukan perhatian serius dari para pembuat kebijakan. Meskipun data empiris berkala menunjukkan adanya tren penurunan persentase penduduk miskin, angka absolut kemiskinan yang menyentuh puluhan juta jiwa tetap mencerminkan adanya beban pengeluaran hidup yang semakin berat. Lebih jauh lagi, indikator kemiskinan juga harus dianalisis melalui tingkat kedalaman dan keparahannya guna melihat rata-rata kesenjangan pengeluaran masyarakat miskin terhadap garis kemiskinan yang ditetapkan. Fluktuasi angka kemiskinan ini sangat rentan dipengaruhi oleh guncangan ekonomi, seperti kenaikan harga komoditas pangan utama berupa beras serta kebijakan energi domestik. Kegagalan dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat miskin dapat memicu degradasi kualitas hidup yang berdampak buruk pada stabilitas sosial dan politik negara (Chandriyadi & Rhamadhani, 2026; Silbaqolbina & Najicha, 2022).

2. Disparitas Geografis dan Karakteristik Kemiskinan Wilayah

Analisis spasial terhadap sebaran penduduk miskin di Indonesia mengungkap adanya disparitas atau kesenjangan yang sangat mencolok antara wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan. Persentase dan jumlah penduduk miskin di desa secara konsisten menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan area perkotaan yang padat. Kesenjangan geografis ini menjadi bukti nyata bahwa hasil-hasil pembangunan ekonomi dan infrastruktur nasional belum terdistribusi secara merata ke seluruh pelosok daerah (Aldi & Hanif, 2026; Gafur et al., 2025; Irawaty & Wijayanti, 2026). Selain itu, nilai indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di perdesaan juga jauh lebih tinggi, yang mengindikasikan bahwa kondisi kemiskinan di desa tidak hanya lebih besar secara kuantitas tetapi juga lebih dalam dan kronis. Faktor keterbatasan akses pasar, minimnya konektivitas transportasi, serta rendahnya diversifikasi sektor lapangan kerja menjadi penyebab utama tertinggalnya kawasan pedalaman.

Tingginya kontribusi kebutuhan makanan terhadap pembentukan garis kemiskinan di perdesaan menegaskan bahwa struktur pengeluaran rumah tangga miskin didominasi oleh pemenuhan pangan pokok. Kondisi ini menyebabkan masyarakat desa sangat rentan terhadap inflasi harga pangan musiman yang dapat menyeret mereka ke dalam jurang kemiskinan yang lebih parah. Keterbatasan sarana sanitasi yang layak, air bersih, dan fasilitas pendidikan



menengah di desa turut memperburuk indeks pembangunan manusia di tingkat lokal. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia memiliki karakteristik struktural yang erat kaitannya dengan tata ruang dan kebijakan alokasi sumber daya. Untuk memutus rantai disparitas ini, orientasi pembangunan harus digeser ke wilayah pinggiran melalui penguatan ekonomi domestik desa. Pemerataan pembangunan wilayah menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan bahwa kemakmuran tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan urban (Ginda, 2020; Indriyani et al., 2026; Suprapedi, 2025; Surya et al., 2020).

3. Ketimpangan Pendapatan dan Hambatan Mobilitas Sosial

Ketimpangan pendapatan merupakan kondisi sosiologis di mana distribusi akumulasi kekayaan dan pendapatan di dalam masyarakat berjalan tidak proporsional, sehingga sebagian kecil kelompok menguasai mayoritas sumber daya ekonomi. Tingkat ketimpangan yang diukur melalui koefisien Gini dan visualisasi Kurva Lorenz mencerminkan posisi relatif kesejahteraan individu di dalam tatanan sosial (Apriani & Perwithosuci, 2023; Fauziana et al., 2022; Statistik et al., 2022). Ketika kurva menjauh dari garis pemerataan sempurna, hal itu menandakan adanya konsentrasi kekayaan yang masif pada kelompok menengah ke atas, sementara kelompok bawah hanya mendapatkan porsi yang sangat kecil. Ketimpangan yang tinggi ini berpotensi merusak kohesi sosial dan memicu kecemburuan struktural yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Masalah kesenjangan ini tidak hanya bersifat teknis ekonomis, melainkan berkaitan erat dengan kualitas kebijakan perlindungan hak kepemilikan dan tata kelola kelembagaan negara.

Dampak laten dari tingginya ketimpangan pendapatan adalah terjadinya pembatasan masif terhadap mobilitas sosial vertikal bagi kelompok masyarakat lapisan bawah. Anak-anak yang lahir dari keluarga miskin cenderung kesulitan untuk memperbaiki status sosial ekonomi mereka karena terbentur oleh mahalnya biaya pendidikan berkualitas dan keterbatasan jaringan kerja informal. Kondisi ini menciptakan fenomena perangkap kemiskinan antar generasi, di mana status kemiskinan orang tua diwariskan secara otomatis kepada anak-anak mereka. Ketimpangan pendapatan bertindak sebagai katalis yang memperkuat bertahannya kemiskinan struktural karena menutup pintu peluang bagi masyarakat miskin untuk bersaing secara adil di pasar kerja formal. Tanpa adanya intervensi kebijakan redistribusi aset yang agresif, mekanisme pasar bebas akan cenderung memperlebar jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan hanya akan melahirkan eksklusi ekonomi yang merugikan produktivitas nasional (Amsari et al., 2024; Hababil et al., 2024; Irmawanti & Winario, 2026; Regina, 2022).

4. Dinamika Pertumbuhan Inklusif dan Perangkap Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir belum sepenuhnya mampu bertransformasi menjadi pertumbuhan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan nilai Produk Domestik Bruto sering kali tidak diikuti secara linier oleh penurunan angka kemiskinan dan pemerataan distribusi pendapatan secara signifikan. Manfaat dari ekspansi ekonomi modern cenderung lebih banyak diserap oleh sektor padat modal yang hanya mempekerjakan tenaga kerja berkeahlian tinggi dari kelompok elite. Sementara itu, mayoritas masyarakat miskin masih tertahan di sektor informal dan pertanian tradisional dengan produktivitas rendah serta perlindungan hukum yang sangat minim. Pola pertumbuhan yang eksklusif ini mempertegas pandangan bahwa kue pembangunan hanya dinikmati secara terbatas, sehingga memperlebar jurang kesenjangan sosial di ruang publik.

Kondisi ini dapat dijelaskan melalui teori kausasi kumulatif, di mana wilayah atau kelompok yang sudah maju akan terus menarik modal dan bakat, sedangkan wilayah tertinggal semakin kehilangan daya saing. Lingkaran setan ini menyebabkan proses pengentasan



kemiskinan berjalan lambat dan rentan mengalami kemunduran saat terjadi guncangan eksternal seperti krisis fiskal global atau pandemi. Kelompok rentan yang tidak memiliki tabungan finansial memadai dan jaminan sosial yang kuat akan dengan mudah jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan ekstrem ketika kehilangan pekerjaan. Hambatan operasional seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial dan lemahnya integrasi data targeting turut memperparah efisiensi anggaran negara. Maka dari itu, kebijakan makroekonomi harus disinkronkan dengan program jaring pengaman sosial yang adaptif agar mampu melindungi masyarakat dari risiko perangkap kemiskinan yang permanen (Setyadi et al., 2025).

5. Strategi Akselerasi Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang masih tinggi di Indonesia bertindak sebagai hambatan utama yang memperlambat akselerasi pencapaian target-target *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Alam et al., 2023; Amirya & Irianto, 2023; Arifah & Zaki, 2020). Khususnya pada tujuan pertama mengenai penghapusan kemiskinan dan tujuan kesepuluh tentang pengurangan kesenjangan, pencapaian kedua agenda ini membutuhkan pendekatan kebijakan yang holistik dan terintegrasi. Kebijakan pengentasan kemiskinan tidak boleh lagi hanya mengandalkan program bantuan sosial tunai yang bersifat karitatif dan jangka pendek. Pemerintah harus merancang strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata di seluruh daerah. Investasi besar pada sektor pendidikan vokasi, kemudahan akses modal usaha mikro, serta penguatan jaminan kesehatan universal merupakan langkah strategis untuk menaikkan kelas ekonomi kelompok marjinal.

Selain penguatan kapasitas individu, pembenahan pada struktur birokrasi dan tata kelola data terpadu menjadi kunci penting untuk meningkatkan akuntabilitas program nasional. Sinkronisasi kebijakan antara kementerian dan penguatan konektivitas infrastruktur antar wilayah diperlukan untuk mengikis disparitas antara pusat pertumbuhan dan daerah tertinggal. Kebijakan fiskal melalui penerapan sistem pajak progresif dan redistribusi anggaran pembangunan ke sektor pelayanan publik dasar harus dijalankan secara konsisten demi mewujudkan keadilan sosial. Melalui sinergi yang kokoh antara pengambil kebijakan, sektor swasta, dan elemen masyarakat sipil, prinsip utama SDGs untuk tidak meninggalkan siapa pun di belakang dapat diwujudkan secara nyata. Pada akhirnya, keberhasilan mengatasi tantangan kemiskinan dan ketimpangan ini akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan visi pembangunan Indonesia yang adil, makmur, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemiskinan multidimensional dan ketimpangan pendapatan merupakan hambatan struktural utama yang saling memperkuat dalam memperlambat pencapaian agenda *Sustainable Development Goals* di Indonesia. Hambatan ini tidak hanya termodifikasi dalam bentuk keterbatasan daya beli materi, melainkan juga berwujud pada rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap jaminan kesehatan dasar serta pendidikan bermutu. Disparitas geografis yang mencolok antara wilayah perkotaan dan perdesaan mempertegas bahwa kue pertumbuhan ekonomi makro belum terdistribusi secara inklusif ke seluruh pelosok daerah. Akumulasi kekayaan yang cenderung terkonsentrasi pada segelintir kelompok modal menyebabkan penurunan mobilitas sosial vertikal dan memicu perangkap kemiskinan antargenerasi. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial menjadi prasyarat mutlak yang harus diselesaikan demi mewujudkan visi pembangunan nasional yang berkeadilan.



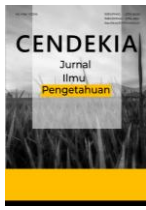
Pemerintah disarankan untuk segera merumuskan strategi redistribusi pendapatan yang agresif melalui optimalisasi sistem pajak progresif dan penguatan program perlindungan sosial yang adaptif. Para pengambil kebijakan perlu membenahi akurasi tata kelola data terpadu kesejahteraan sosial guna memitigasi risiko ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan fiskal. Prioritas pembangunan harus digeser secara konkret ke wilayah pinggiran melalui investasi masif pada sektor infrastruktur publik digital dan pendidikan vokasi di perdesaan. Selain itu, sinkronisasi kebijakan lintas sektoral harus diperkuat untuk menciptakan lapangan kerja padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja lokal usia produktif secara merata. Sinergi berkelanjutan antara instansi negara dan masyarakat sipil wajib ditingkatkan agar komitmen global untuk tidak meninggalkan siapa pun di belakang dapat terealisasi secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. Z. I., Zaid, M., & Alam, A. A. F. (2023). Digitalisasi sistem perlindungan sosial kebijakan di Indonesia sebagai langkah menuju masyarakat 5.0. *Journal Social Society*, 3(2), 95–112. <https://doi.org/10.54065/jss.3.2.2023.335>
- Aldi, M., & Hanif, M. (2026). Peran guru dalam penguatan literasi digital peserta didik SMP Raden Fatah Cimanggu. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(1), 159–170. <https://doi.org/10.51878/learning.v6i1.8904>
- Amirya, M., & Irianto, G. (2023). Tantangan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Accounting Peradaban*, 9(1), 187–198. <https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.38916>
- Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Transformasi paradigma pembangunan ekonomi: Membangun masa depan berkelanjutan melalui perspektif ekonomi syariah. *EKONOMIS: Journal of Economics and Business*, 8(1), 729–739. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1703>
- Annisa, Y. (2022). Pemberdayaan KPM PKH melalui kegiatan Family Development Session (FDS). *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat*, 7(2), 1–12. <https://doi.org/10.24014/jmm.v7i2.16895>
- Apriani, A. R., & Perwithosuci, W. (2023). The effect of world oil price fluctuations, CO2 emissions, GDP per capita, government expenditures and trade openness on income inequality in ASEAN. Dalam *Advances in Economics, Business and Management Research* (hlm. 880–893). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-204-0_73
- Arifah, S. R., & Zaki, I. (2020). Sumbangi pesantren Mukmin Mandiri dalam menyukseskan Sustainable Development Goals (SDGs) melalui pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(8), 1501–1513. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20208pp1501-1513>
- Badan Pusat Statistik, Dewi, D. M., Setiadi, Y., STIS, P. S., Ikhwanuddin, M., Fadhilah, L. A. (2022). Kontribusi teknologi informasi dan komunikasi terhadap kelompok ketimpangan pendapatan daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 22(2), 221–242. <https://doi.org/10.21002/jepi.2022.13>
- C, A. D. I., Situmorang, O., Mare, R. J. S., Tampubolon, S. A., Yusriah, S., Hutabarat, Y., & Harahap, L. M. (2026). Dinamika kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia dalam perspektif pembangunan ekonomi. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 4(1), 69–81. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v4i1.3754>



- Chandriyadi, M. F., & Rhamadhani, N. (2026). Kenaikkan harga BBM dan dampaknya terhadap kepentingan publik. *Desentralisasi*, 3(1), 144–149. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v3i1.1562>
- Fatikasari, F., Yuwono, A., & Sukoyo, J. (2026). Efektivitas model pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran bahasa Jawa dalam materi sastra piwulang. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(1), 29–39. <https://doi.org/10.51878/learning.v6i1.8903>
- Fauziana, H., Wardhana, A. K., & Rusgianto, S. (2022). The effect of education, income, unemployment, and poverty toward the Gini ratio in member of OIC countries. *Daengku Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 2(2), 181–191. <https://doi.org/10.35877/454ri.daengku874>
- Fuady, M., Fuady, M. R. F., & Aulia, F. (2022). Kemiskinan multi dimensi dan indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Jurnal Tataloka*, 24(4), 330–337. <https://doi.org/10.14710/tataloka.24.4.330-337>
- Gafur, A., Rahmi, S. H., & Ahmadi, F. (2025). Analisis kesenjangan ekonomi daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia. *Economica Insight*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.71094/ecoin.v2i1.203>
- Ginda, G. (2020). Optimalisasi koperasi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat desa. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 5(2), 40–51. <https://doi.org/10.24014/jmm.v5i2.11686>
- Hababil, M. P., Firdaus, M., Nazhmi, N., Hamdani, M. D., Alghifary, M. R., & Fadilla, A. (2024). Analisis pengaruh pemerataan ekonomi dalam upaya menghapus ketimpangan sosial-ekonomi antar masyarakat. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–9. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.276>
- Indriyani, D., Azzahra, N. F., Sabila, A. F. N., Juniarti, R. A., & Suhendi, S. (2026). Analisis anggaran sederhana pada UMKM: Studi kasus Kedai Masakanna Panyileukan. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 6(3), 1553–1563. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i3.10833>
- Irawaty, L., & Wijayanti, R. (2026). Pembaharuan pendidikan di era teknologi digital: Strategi adaptasi pembelajaran dalam menghadapi tantangan abad ke-21. *MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 6(2), 512–521. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v6i2.10769>
- Irmawanti, I., & Winario, M. (2026). Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan: Dampaknya terhadap kemiskinan di Indonesia. *Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences*, 3(1), 29–38. <https://doi.org/10.63477/mjrs.v3i1.434>
- Jati, W. R., Husna, I., Raharjo, Karnani, A., Khadafi, R., Mutiarin, D., Leopold, T., Nisak, S., Sofiatun, L., Sugiharti, Putri, L., Rakhmawati, S., & Zeka, B. (2023). “Narimo ing pandum”: How highlander women perceive poverty as a destiny in Gunungkidul, Yogyakarta. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 28(1), Artikel 4. <https://doi.org/10.7454/mjs.v28i1.13558>
- Lefaan, A. S. (2025). *Buku ajar teori dan model pemberdayaan masyarakat*. Widina Media Utama / Neliti. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/593195/buku-ajar-teori-dan-model-pemberdayaan-masyarakat>
- Noer, K. U. (2021). Empowerment of women as head of poor family through the P2WKSS program in Bekasi City. *Community Empowerment*, 6(5), 864–876. <https://doi.org/10.31003/ce.4553>



- Prasetyo, P. E., & Setyadharma, A. (2022). Digitalization technology for sustainable rural entrepreneurship and inequality. *Journal of Human Resource and Sustainability Studies*, 10(3), 464–484. <https://doi.org/10.4236/jhrss.2022.103028>
- Putri, A. Z., & Choiri, M. (2024). Efficiency of SDGs implementation in village sustainable development to reduce income distribution inequality. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*, 34(1), 46–63. <https://doi.org/10.20473/jeba.v34i12024.46-63>
- Regina, T. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *KOMPLEKSITAS: Jurnal Ilmiah Manajemen Organisasi Dan Bisnis*, 11(1), 36–45. <https://doi.org/10.56486/kompleksitas.vol11no1.201>
- Ruhana, F., Nasution, M. S., Susniwan, Ardiansyah, & Sutiapermana, A. (2024). Combating poverty and social inequality in 2023 a global imperative for equitable development and social justice. *International Journal of Science and Society*, 6(1), 899–912. <https://doi.org/10.54065/ijssoc.v6i1.1081>
- Sabur, A., Khusaini, K., & Ramdani, H. C. (2021). Education equality and economic growth in Indonesia. *Jejak: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 14(1), 167–182. <https://doi.org/10.15294/jejak.v14i1.26162>
- Setyadi, S., Indriyani, L., & Widiastuti, A. (2025). The role of economic and social safety nets in extreme poverty in Indonesia. *ETIKONOMI*, 24(2), 245–258. <https://doi.org/10.15408/etk.v24i2.38851>
- Silbaqolbina, Y. Z., & Najicha, F. U. (2022). Kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak serta dampaknya bagi masyarakat. *Jurnal Syntax Fusion*, 2(6), 604–11. <https://doi.org/10.54543/fusion.v2i06.198>
- Suprapedi, S. (2025). *Policy brief membangun klaster desa terpadu untuk meningkatkan daya saing ekonomi*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18011741>
- Surya, B., Saleh, H., Hamsina, H., Idris, M., & Ahmad, D. N. A. (2020). Rural agribusiness-based agropolitan area development and environmental management sustainability: Regional economic growth perspectives. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 11(1), 142–157. <https://doi.org/10.32479/ijeep.10184>
- Toper, F., & Aslan, H. (2023). *Examining multidimensional poverty among university students*. DergiPark / Istanbul University. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tpd/issue/76198/1236283>